

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sering kali diartikan sebagai suatu proses perubahan terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih baik, dimana dalam Undang-Undang 1945 keadaan yang lebih baik tersebut dinyatakan dengan masyarakat yang adil dan makmur ternyata belum dapat sepenuhnya di wujudkan oleh pemerintah Indonesia (Moeljarto, 1995).

Berbagai usaha sebenarnya telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945, walaupun pembangunan secara nyata pada dasarnya dimulai dilaksanakan pada era pemerintahan Orde Baru yaitu tepatnya ketika pemerintah mulai merencanakan Repelita sebagai landasan perencanaan pembangunannya. Namun demikian, usaha yang telah dilakukan pemerintah setelah hampir 60 tahun sejak kemerdekaannya dan setelah enam kali berganti pemimpin, ternyata belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pokok dari pembangunan. Permasalahan yang muncul dalam pencapaian tujuan tersebut terasa semakin berat seiring dengan bertambahnya waktu.

Permasalahan krusial yang hingga kini belum bisa dituntaskan salah satunya adalah masalah pendistribusian hasil-hasil pembangunan atau dengan kata lain masalah keadilan dalam merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung tidak proporsional sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh sebagian penduduk Indonesia dan pada akhirnya memunculkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian penduduk lainnya.

Munculnya masalah keadilan dan pemerataan ini tentulah bukan merupakan hal yang dicari-cari karena sebenarnya masalah ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu Belanda memfokuskan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial seperti; jalan, Rumah Sakit, sekolah, dan lain sebagainya hanya di pulau Jawa saja, yang pada saat itu digunakan untuk kepentingan penjajah Belanda.

Permasalahan ketimpangan ini terus berlanjut dari mulai pemerintahan Orde Baru hingga sekarang di era Reformasi. Walaupun pada dasarnya salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah adanya perbedaan potensi dan karakteristik wilayah serta sumber daya, akan tetapi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mendistribusikan hasil-hasilnya memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam masalah ketimpangan tersebut.

Salah satu unsur perubahan adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota. Tuntutan itu wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu yang telah menimbulkan masalah rendahnya kredibilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2002).

Arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena kondisi sumber daya daerah yang dirasa masih relatif lemah. Terdapat dua alasan hal tersebut terjadi, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, tuntutan pembelian otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada pandangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan.

Sesuai dengan harapan dan masyarakat, otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan pembangunan daerah. Bertitik dengan nuansa desentralisasi, maka daerah diberi peluang untuk membangun sendiri daerahnya dengan bingkai acuan dari pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai perundangan dan aturan telah dikeluarkan, diantaranya adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta presiden dapat

membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah, yang akan membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Misi kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pembagian pendapatan daerah agar tidak terjadi ketimpangan. Seperti sudah diketahui, anggaran pendapatan daerah adalah rencana kerja tertentu (satu tahun). Anggaran pendapatan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Pembagian pendapatan digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pemerataan yang akan diperoleh dari hasil pembangunan, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang. Sumber pembagian pendapatan merupakan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerjanya, alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit.

Alokasi pendapatan dalam menyediakan barang publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa konsekwensi

pembagian atau perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan administrasi pada pemerintah daerah, terdapat perbedaan yang tinggi dalam kondisi dan situasi antar daerah kabupaten maupun propinsi (Suparmoko, 2002).

TABEL 1.1.

**PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN
DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI D.I. YOGYAKARTA
BERDASARKAN HARGA KONSTAN
TAHUN 2003**

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta rupiah)	PDRB per kapita (Rp)	PAD (Juta Rupiah)
Kulonprogo	1.222.753	3.302.936	18.250.898
Bantul	3.082.427	3.812.889	32.882.359
Gunungkidul	2.839.990	4.200.578	17.481.692
Sleman	5.456.414	5.790.951	42.522.488
Yogyakarta	4.652.142	11.852.833	68.621.564

Sumber : D.I.Y dalam angka, BPS Yogyakarta, 2004

Tabel di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan dua wilayah dengan PDRB, PDRB per kapita, dan PAD paling besar di D.I. Yogyakarta, dimana jarak antara kedua kabupaten tersebut dengan daerah lainnya saling berjauhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata diikuti oleh fenomena ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari Otonomi Daerah (OTDA) secara keseluruhan. Hal ini disebabkan pengertian pemerataan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Namun demikian harus diakui bahwa pemerataan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara rata-rata masih rendah. Hal ini tercermin dari Tabel 1.1, dimana terjadi ketidakseimbangan pendapatan yang masih terlihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah terhadap penerimaan rutin dan presentase pendapatan dalam tahun yang sama.

Berdasarkan Uraian diatas alasan penulis melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di masyarakat agar rakyat yang miskin tidak terus tertindas dan agar pemerintah mengetahui seberapa jauh ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena penulis dan Universitas Islam Indonesia berlokasi di Yogyakarta, sehingga penulis dapat memberikan suatu masukan atau sumbangan pikiran yang diharapkan berguna bagi kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta. Sedangkan pemilihan tahun 2003, dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pada tahun itu daerah-daerah di Indonesia sudah dua tahun melaksanakan otonomi daerah (disamping pertimbangan ketersediaan data), sehingga diharapkan hasil dari pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999

(yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004) bisa terlihat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, bahwa otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengalokasikan pendapatannya agar sesuai dengan proporsinya. Berkaitan dengan hal ini, peranan pemerintah daerah dalam mendistribusi pendapatannya sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan pemerataan yang selalu didambakan tersebut, maka penulis mengambil pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di D.I Yogyakarta tahun 2003 berdasarkan model Koefisien Variasi?
2. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di D.I Yogyakarta tahun 2003 berdasarkan model Analisis Faktor?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah pada tahun 2003 masih terjadi ketimpangan pembangunan berdasarkan model ketimpangan Koefisien Variasi?

2. Untuk menganalisis apakah pada tahun 2003 masih terjadi ketimpangan pembangunan berdasarkan Model Analisis Faktor?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran pemerintah dalam menjalankan proses pertumbuhan dan pembangunan dimasa mendatang.
2. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi penulis ini merupakan aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu alat analisis yang di dapat dari bangku kuliah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur unsur pokok yang dimuat dalam bab pendahuluan ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini membahas gambaran secara umum atas subjek penelitian, dilakukan dengan merujuk fakta pada data yang bersifat umum sebagai pemahaman secara makro.

Bab III : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang pendokumentasian dan pengkajian dari hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Dari proses ini ditemukan kekurangan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan di mana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian dengan peneliti tersebut.

Bab IV : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati masalah yang akan diteliti untuk mencari hubungan antar variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat, menjelaskan secara implisit yang muncul pada landasan teori, namun belum formal sebagai pernyataan yang siap diuji juga penegasan yang bersifat baku.

Bab V : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab VI : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

Bab VII : Simpulan dan Implikasi

Bab ini berisi simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, serta jawaban atas rumusan masalah. Serta implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sehingga dapat ditarik implikasi teoritis penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1. Keadaan Wilayah dan Kependudukan

2.1.1. Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan di batasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut dibatasi oleh wilayah propinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur laut.
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}33' - 8^{\circ}12'$ Lintang selatan dan $110^{\circ}00' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas $3.185,80 \text{ km}^2$ atau $0,17\%$ dari luas Indonesia ($1.890,754 \text{ km}^2$), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara $100 \text{ m} - 499 \text{ m}$ dari permukaan laut tercatat sebesar $63,18\%$, ketinggian antara $500 \text{ m} - 999 \text{ m}$ sebesar $4,79\%$ dan ketinggian diatas 1000 m sebesar $0,47 \%$ (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.1.2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003, jumlah penduduk D.I Yogyakarta tercatat 3.207.385 jiwa, dengan presentasi jumlah penduduk perempuan 50,26 persen dan penduduk laki-laki 49,74 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 57,52 persen dan penduduk desa mencapai 42,48 persen (BPS DIY dalam angka, 2003).

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2003 adalah 1,61 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman terlihat memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, yaitu masing-masing 2,48 persen, 1,82 persen dan 1,79 persen dan 1,79 persen.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di D.I Yogyakarta 1.007 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.029 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar 1 persen dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63 persen dihuni rata-rata 462 jiwa per km².

Komposisi kelompok umur penduduk D.I Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53 persen dengan kelompok lanjut usia yaitu umur 60 tahun keatas sebesar 13,52 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Propinsi DIY pada tahun 2003 didukung oleh 90.441 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan tersebar pada 5 Kabupaten/Kota di DIY. Menurut golongan dari PNS di DIY, 1,91 persen menduduki golongan I, golongan II sebesar 23,69 persen, 54,71 persen menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 19,69 persen.

Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2003 sebanyak 94.881 orang, menurun sekitar 11,26 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.923 orang. Menurut hasil Susenas 2003, persentase penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta umur 10 tahun keatas menurut kegiatan adalah 63,84 persen merupakan angkatan kerja (58,63 persen bekerja dan 5,21 persen mencari pekerjaan), sedangkan sisanya sebesar 36,16 persen merupakan bukan angkatan kerja (Sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Sedangkan menurut lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 37,44 persen, perdagangan 19,75 persen, jasa 17,15 persen, industri 12,18 persen dan sisanya 13,48 persen di sektor-sektor lainya (BPS DIY dalam angka, 2003).

2.1.3. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem peleporan yang standar diperlukan untuk pemantauan posisi keuangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan keuangan publik. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi hasil pembangunan dengan anggaran yang dapat diserap.

Berdasarkan data RAPBD Propinsi D.I Yogyakarta tahun 2003, rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp. 524,49 milyar, naik 8,90 persen dibanding realisasi tahun 2002 yang sebesar Rp. 481,64 milyar. Sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (sumbangan mencapai 40,89 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah 39,75 persen).

Sisi pengeluaran pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp. 524,49 milyar atau naik 17,67 persen. Pengeluaran rutin tetap merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 83,46 persen dari total pengeluaran (terutama untuk belanja pegawai sebesar 51,50 persen) sedangkan sisanya pengeluaran pembangunan untuk UKP masing-masing sebesar 11,34 persen dan 5,20 persen. Dengan demikian, di pos pengeluaran terjadi kesenjangan yang masih cukup besar antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Jika pada tahun 2001, di luar pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebesar 84 persen banding 16 persen. Sedangkan tahun 2002 tercatat 86 persen dan 14 persen dan tahun 2003 sebesar 88 persen dan 12 persen. Komposisi ini tentu tidak sehat bagi kesinambungan pembangunan yang telah dicanangkan.

Bank Indonesia mencatat jumlah bank yang beroperasi di wilayah D.I Yogyakarta pada tahun 2003 sebanyak 83 bank, bertambah satu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 74,70 persen diantaranya merupakan bank perkereditan rakyat. Jumlah kantor bank tercatat sebanyak 259 unit, tidak termasuk kantor inspeksi dan BRI unit.

Besarnya dana yang dihimpun dari masyarakat pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 9,16 trilyun, naik 11,29 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8,23 trilyun. Sekitar 47,99 persen dari dana yang dihimpun tersebut berbentuk tabungan, 33,39 persen simpanan berjangka dan selebihnya sekitar 18,62 persen dalam bentuk giro.

Di bidang investasi, kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang masuk Propinsi D.I Yogyakarta sampai tahun 2003 sebesar Rp. 2,41 trilyun atau 118,60 persen dari rencana yang ditetapkan. Sebagian investasi dalam negeri yang masuk ditanam di sektor tersier (listrik, bangunan dan jasa) sekitar 49,65 persen dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 2,01 persen. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan investasi tersebut sebanyak 27.249 TKI dan 18 orang tenaga kerja asing (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.1.4. Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dibentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan

dan harga berlaku. Dari PDRB atas dasar harga konstan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertumbuhan nilai riil ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian Propinsi D.I Yogyakarta tahun 2003 tumbuh sebesar 4,09 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,02 persen (angka diperbaiki). Hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi D.I Yogyakarta tahun 2003 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor. Sektor Bangunan tetap mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 10,32 persen. Disusul dengan sektor Perdagangan dan sektor Listrik, Gas, Air Minum masing-masing sebesar 5,73 persen dan 5,72 persen. Sedangkan sektor pertanian yang sebelumnya tumbuh negatif, pada tahun 2003 mampu tumbuh positif sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tercatat sebesar 4,98 persen. Sebagai daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan jasa, kondisi ini memperlihatkan masih dinamisnya aktivitas ekonomi. Selain sektor-sektor diatas, sektor-sektor Industri Pengelolaan dan sektor Angkutan dan Komunikasi juga berperan positif meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh sebesar 2,38 persen dan 2,33 persen.

Sektor Industri meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan sektor Pertanian maupun sektor Jasa-jasa, namun sektor Industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat Industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp. 18.838.844 juta dengan PDRB per kapita sebesar Rp 5.906.623 atau naik 11,92 persen.

Berdasarkan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian propinsi D.I Yogyakarta mulai tergeser oleh sektor lain. Pada tahun 2003, andil terbesar dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 19,31 persen, kemudian sektor Jasa-jasa sebesar 17,47 persen. Kemudian sektor Pertanian dan Industri Pengelolaan memiliki andil 16,54 persen serta Angkutan dan Komunikasi tercatat sebesar 10,48 persen. Sedangkan sektor Bangunan serta sektor Pertambangan dan Penggalan masing-masing sebesar 8,44 persen, dan 1,41 persen. Sektor Listrik, Gas, air Bersih merupakan sektor dengan andil kecil atau tercatat sebesar 0,92 persen dari total PDRB harga berlaku (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.2. Perkembangan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2003 tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi terhadap terjadinya pemerataan pembangunan, jadi hampir sama dengan tahun sebelumnya kecuali sektor bangunan yang paling pesat mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 10,32 %, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Dimana sektor ini untuk realisasi pembangunan perumahan oleh perum perumnas di DIY sampai dengan 30 juni 1999 tercatat sebanyak 4.613 unit, yang terdiri dari tipe rumah inti 38,69% dan rumah sederhana 61,31% dan kumulatif pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit dari BTN tercatat sebanyak 17.314 unit dengan nilai kredit sebesar Rp. 91.586,2 juta (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.3. Potensi Ekonomi

Potensi daerah yang dikemukakan pada bagian ini berupa potensi di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan serta potensi lainnya. Potensi daerah merupakan modal besar bagi Propinsi untuk melaksanakan pembangunan (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.3.1. Potensi Pertanian

Potensi pertanian meliputi komoditas padi, palawija serta hortikultura. Tanaman palawija terdiri dari komoditas jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai serta kacang hijau. Adapun hortikultura terdiri dari komoditas sayur-sayuran, buah-buahan

serta tanaman hias. Data tanaman hias tidak disajikan karena pengumpulan data tidak rutin setiap tahun (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

Pada tahun 2003, produksi padi tercatat sebesar 652.280 ton (mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dari tahun 2002) dengan rincian 80,57 persen merupakan padi sawah dan 19,43 persen padi ladang. Dengan luas panen masing-masing sebesar 94.629 ha dan 36.052 ha diperoleh angka produktivitas sebesar 5,55 ton ha untuk padi ladang. Produksi palawija didominasi oleh komoditas ketela pohon sebesar 764.409 ton, kemudian jagung sebesar 204.129 ton serta kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 57.767 ton dan 35.562 ton. Adapun ketela rambat dan kacang hijau relatif kecil masing-masing 7.578 ton dan 563 ton. Komoditas yang mengalami kenaikan produksi apabila dibandingkan dengan tahun 2002 adalah jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, dan cantel masing-masing sebesar 19,55 persen, 1,89 persen, 6,73 persen, 21,86 persen, dan 0,83 persen. Sedangkan kacang tanah dan kacang kedelai mengalami penurunan sebesar 1,22 persen, dan 30,24 persen (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.3.2. Potensi Perkebunan

Dari segi produksi, tanaman Perkebunan yang cukup potensial di Propinsi D.I Yogyakarta adalah kelapa dan tebu. Pada tahun 2003 produksi masing-masing komoditas mencapai 47.532 ton dan 13.992 ton.

Angka ini mengalami kenaikan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,55 persen dan 2,39 persen (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.3.3. Potensi Kehutanan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kawasan hutan yang terkonsentrasi di Kabupaten Gunungkidul seluas 77,60 persen dari keseluruhan 17,05 ribu ha. Sebagian besar dari kawasan hutan tersebut merupakan hutan produksi sebesar 81,22 persen, hutan lindung 13,44 persen dan hutann konversi 5,34 persen. Nilai produksi hutan pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp. 3.037 juta, meningkat sekitar 18,07 persen dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp. 2.573 juta (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003).

2.3.4. Potensi Peternakan

Populasi ternak di D.I Yogyakarta tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 3,20 persen dari 586.367 ekor pada tahun 2002 menjadi 567.591 ekor pada tahun 2003. Jenis ternak yang dominan adalah kambing, sapi, dan domba masing-masing sebesar 42,46 persen, 39,51 persen, dan 13,95 persen pada tahun 2003. andil perusahaan sebesar 67,16 persen dan yang berasal dari peternakan rakyat sebesar 32,84 persen. Sedangkan produksi kulit turun 24,61 persen dari 74,254 lembar pada tahun 2002 menjadi 55.981 lembar pada tahun 2003.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Telaah pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya dan di jadikan sebagai sumber penulis untuk membahas tentang ketimpangan pembangunan regional. Tujuan dari telaah pustaka adalah sebagai landasan teori untuk penelitian yang akan dikerjakan dan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, sehingga penelitian ini mempunyai landasan yang kuat dan dapat mengetahui perbedaan yang diperoleh.

Penelitian tentang ketimpangan pembangunan pernah dilakukan. Dari beberapa peneliti yang ada dengan variabel yang sama , dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Haeruman

Menurut Haeruman (1996), dalam penelitian yang berjudul “Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah” yang bertujuan untuk melihat pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif yaitu memaparkan permasalahan dengan menganalisis data-data yang tersedia. Data-data yang digunakan dalam melihat ketimpangan pembangunan, dalam tulisan ini antara lain PDRB per kapita, dan laju pertumbuhan PDRB.

Penelitian yang dikemukakan menyimpulkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, selain

menunjukkan keberhasilan berupa peningkatan pendapatan per kapita rata-rata nasional, juga menghasilkan derajat ketimpangan yang semakin besar khususnya dalam pembangunan antar daerah. Pada dasarnya upaya untuk memperkecil tingkat kesenjangan telah banyak dilakukan terutama melalui program-program bantuann ke daerah melalui program Inpres ke daerah-daerah yang relatif terbelakang, namun kesenjangan masih terjadi antar daerah-daerah di Jawa dengan daerah di luar Jawa khususnya Kawasan Timur Indonesia.

2. Sjafrizal

Menurut Sjafrizal (1997), dalam penelitian yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Barat”, melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi maupun angka ketimpangan pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Koefisien Variasi Williamson yang diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan pembangunan regional di Wilayah Barat Indonesia dalam periode Tahun 1987-1993 ternyata lebih baik dibandingkan dengan keadaan rata-rata seluruh Indonesia baik itu menyangkut pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing propinsi umumnya cukup tinggi yaitu berkisar antara 7 sampai dengan 8,5 persen per tahun, sementara ketimpangan pembangunan juga menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dari angka nasional.

3. Haryadi

Menurut Haryadi (1996), ketimpangan terjadi tidak hanya mencakup ketimpangan pendapatan antar daerah, akan tetapi telah mewarnai hampir di semua sendi pembangunan di Inonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada lima jenis ketimpangan yang mewarnai pembangunan di Indonesia, antara lain :

- a. Ketimpangan regional.
- b. Ketimpangan Pertumbuhan Sektoral.
- c. Ketimpangan antar Skala Usaha.
- d. Ketimpangan antar Perspektif gender, dan
- e. Ketimpangan Pendapatan.

Ketimpangan Pembangunan Regional merupakan ketimpangan yang paling populer karena dirasakan akan membawa akibat yang cukup serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketimpangan dalam hal ini menyebutkan bahwa adanya ketimpangan pembangunan regional yang telah memicu berbagai konflik di Wilayah Indonesia. Konflik ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat daerah yang merasa bahwa apa yang mereka dapatkan. Rasa ketidakpuasan pada akhirnya menimbulkan suatu kesadaran kolektif yang ternyata tidak dapat disalurkan melalui kelembagaan politik yang ada sehingga muncul pergolakan daerah.

4. Anwar dan Hadi

Menurut Anwar dan Hadi (1996), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan pembangunan regional adalah karena adanya perbedaan karakteristik berupa Sumber Daya Alam (SDA), perbedaan demografi, perbedaan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), perbedaan aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan aspek potensi pasar

5. Budiono dan Uppal

Budiono dan Uppal (1986), melakukan penelitian tentang kesenjangan/ketimpangan ekonomi antardaerah yang terjadi di Indonesia selama periode tahun 1976-1980, memberikan kesimpulan bahwa kesenjangan/ketimpangan selama periode tahun 1976-1980 mengalami penurunan kecuali tahun 1979. penelitian ini menemukan bahwa penempatan Industri berskala menengah dan besar di daerah yang relatif miskin merupakan kebijaksanaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi (Putranto dan Ningsih, 2001).

6. Kameo dan Reitveld

Kameo dan Reitveld (1987), melakukan penelitian tentang kesenjangan/ketimpangan ekonomi antardaerah dengan menggunakan periode tahun 1973-1982. penelitian ini memperlihatkan fenomena yang sebaliknya yaitu menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antardaerah di Indonesia mengalami peningkatan. Kameo dan Reitveld menganjurkan alternatif perhitungan pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan (*disposable*

income). Tetapi perhitungan *disposable income* sulit dilakukan di tiap daerah, maka alternatif terbaik adalah menggunakan pengeluaran per kapita (Putranto dan Ningsih, 2001).

7. Anwar Sanusi

Anwar Sanusi (1992), yang meneliti “Ketimpangan Ekonomi Antardaerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1978-1989” mengemukakan bahwa perubahan perekonomian di Daerah Tingkat II dalam sektor-sektor tertentu yang tumbuh cepat dan lambat. Analisa ini menemukan ketimpangan antardaerah Tingkat II yang cukup tinggi, dalam penelitian ini menunjukkan adanya daerah Tingkat II di Jawa Tengah yang merupakan sektor basis yaitu Kabupaten Cilacap (Putranto dan Ningsih, 2001).

8. Ardani

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardani (1996), yang meneliti tentang “Ketimpangan Ekonomi Antardaerah Tingkat II di Indonesia”, dalam penelitiannya dilihat dari segi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita baik dengan gas maupun tanpa migas, dan menyesuaikan harga (*adjusted price*), selama periode tahun 1968-1993. Dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa ketimpangan/kesenjangan antardaerah di Indonesia cenderung mengikuti tahapan pembangunan. Pada tahapan pembangunan kesenjangan antardaerah cenderung meningkat dan kemudian akan turun kembali (Putranto dan Ningsih, 2001).

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU No.32/2004) tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang rancangan kebijakan terhadap pemerintah daerah yang dinyatakan dalam Bab XIII pasal 224 ayat (1) dan ayat (2), yaitu (Tabrani, 2004) :

- a) Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- b) Ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan :
 - a. pembentukan, penyempurnaan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
 - b. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi :
 1. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasar besaran DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang mendasar atas disahkannya kedua UU tersebut adalah pada terdapatnya kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah menjadi isi dan isu utama otonomi daerah, maka fungsi keuangan menjadi sangat penting bagi daerah sebab keuangan merupakan motor bagi penggerak roda perekonomian daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan daerah, maka organisasi pengelola keuangan juga akan mengalami perubahan.

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985), dalam sebuah analisis yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2002) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Abdul Halim, 2004).

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang yang diupayakan

untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian tersebut adalah merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai penggerak jalannya pemerintahan daerah (Abdul Halim, 2004).

4.2. Pengertian Pembangunan

Definisi pembangunan ekonomi mengalami perkembangan dinamis, karena permasalahan yang dihadapi juga berkembang. Persoalan-persoalan yang terjadi merupakan masalah pokok pembangunan (pertumbuhan ekonomi) ternyata memunculkan persoalan baru yang tidak kalah rumit.

Pengertian pembangunan selama dua dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional di mana keadaan ekonomi mula-mula kurang lebih statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan suatu kenaikan *Gross National Product* (GNP) antara 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada kenaikan GDP saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan. Hal ini terlihat pada taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan GDP pertahun tetap tercapai (Arsyad, 1992).

Pengertian pembangunan sangatlah luas bukan hanya sekedar menaikkan GDP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

Definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan (Arsyad, 1992) :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 1992).

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbul perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju

pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP (Arsyad, 1992).

Pertambahan GDP/GNP mempunyai kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Dalam jangka waktu tertentu, pada saat GDP/GNP dihitung, disamping akan terdapat pertambahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat pertambahan penduduk pun terjadi. Dengan demikian, sebagian pertambahan hasil kegiatan ekonomi tersebut harus digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pertambahan GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah dari pada pertambahan penduduk, berarti pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1992).

Kemungkinan timbulnya keadaan seperti diatas, maka beberapa ekonom memberikan perbedaan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom yang membedakan kedua istilah tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai (Arsyad, 1992):

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak

Berdasarkan kriteria pembangunan yang baru fenomena pembangunan atau adanya situasi keterbelakangan yang kronis sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi atau sekedar soal pengukuran tingkat pendapatan, masalah ketenagakerjaan, atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Keterbelakangan sebuah pembangunan merupakan kenyataan riil dalam kehidupan sehari-hari bagi lebih dari 3 milyar orang di planet ini. Yang dimaksud dengan keterbelakangan di sini bukan hanya angka-angka kemiskinan nasional, melainkan juga menyangkur keterbatasan berfikir penduduk miskin di negara-negara terbelakang yang bersangkutan (Todaro, 2004).

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2004).

4.2.1. Indikator Pembangunan

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Penekanan pada kenaikan pendapatan per kapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk) dan tidak hanya kenaikan pendapatan nasional riil menyiratkan bahwa perhatian pembangunan bagi negara miskin adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapatan nasional riil (atau GNP pada harga konstan) yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup. Bila pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional maka pendapatan per kapita bisa turun atau tidak berubah, dan jelas ini tidak dapat disebut ada pembangunan ekonomi (Kuncoro, 1997).

4.2.1.1. Pendekatan Pendapatan Perkapita

Pendekatan perkapita merupakan indikator mula-mula yang digunakan untuk mengukur pembangunan suatu negara. Karena mula-mula dilihat adalah permasalahan pembangunan adalah persoalan menumbuhkan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan antara negara-negara maju dan Negara Sedang Berkembang. Dengan kata lain, pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan

perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antar berbagai negara.

Penggunaan pendapatan per kapita itu sebagai suatu indikator pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja. tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula oleh perubahan-perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi (Arsyad, 1992).

Salah satu kelemahan penting dari tingkatan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan (indeks kesejahteraan) adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Sebenarnya sudah lama orang meragukan kebenaran anggapan bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan pencerminan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh suatu masyarakat. Namun demikian, masih tetap disadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, karena memang disamping itu ada beberapa faktor lain yang seringkali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan masyarakat itu suatu hal yang subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup dan tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda. Dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Ada kelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Secara lebih khusus, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang (*gap*) tingkat kesejahteraan antar masyarakat mempunyai kelauman karena perbandingan dengan mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antar berbagai negara dalam hal berikut : struktur umum penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang (*kurs*) dengan mata uang luar negeri (Arsyad, 1992).

Di Negara Sedang Berkembang (NSB) biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia muda adalah lebih tinggi daripada di negara-negara maju. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh pendapatan per kapita mereka.

4.2.1.2. Human Development Index (HDI)

Upaya yang paling ambisius dan terbaru dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi, baik di NSB maupun negara maju telah dilakukan oleh UNDP (United National Development Program) secara sistematis dan komprehensif. HDI mencoba meranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu (Kuncoro, 1997) :

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga)
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurut *utility marginal* penghasilan dengan cepat.

Berdasarkan atas 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 kelompok, (Kuncoro, 1997) :

1. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,50

2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila bernilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,75.
3. Negara dengan pembangunan manusia yang tertinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Negara dengan nilai HDI dibawah 0,5, berarti tidak memperhatikan pembangunan manusianya, negara dengan nilai HDI 0,51 hingga 0,75 berarti mulai memperhatikan pembangunan manusianya, negara dengan nilai HDI lebih dari 0,8 berarti amat memperhatikan pembangunan manusianya. Dengan demikian, indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Memang suatu pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya.

Pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu alat penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyatnya menggunakan kapabilitasnya. Amartya Sen, seorang ahli ekonomi dari Harvard, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu ekspansi dan kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil di NSB adalah

menurunnya kualitas hidup daripada rendahnya pendapatan. Sen menginterpretasikan pembangunan sebagai proses yang memperluas *entitlement* dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya. “*Entitlement*” adalah sejumlah komoditi yang dapat diperoleh seseorang dalam masyarakat dengan menggunakan seluruh hak dan peluang yang dimiliki. “Kapabilitas”, diartikan sebagai mencakup apa yang dapat maupun tidak dapat dilakukan, misalnya bebas dari kelaparan, dari kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, bebas bepergian menengok teman, memperoleh tempat tinggal yang memadai (Kuncoro, 1997).

4.2.1.3. Physical Quality Life Index (PQLI)

Morris D. yang memperkenalkan *Physical Quality Life Index* (PQLI), yang lazim diterjemahkan sebagai Indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator, yaitu (Kuncoro, 1997) ; Harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah kinerja terbalik. Begitu kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan skala 1 hingga 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks komposit dapat dihitung dari rata-rata

penilaian atas ketiga indikator, dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator.

4.2.2. Dualisme Regional dalam Pembangunan

Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial-ekonomi Negara Sedang Berkembang (NSB). Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme mempunyai 4 unsur pokok, yaitu (Arsyad, 1992) :

1. Dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat "superior" dan lainnya bersifat "inferior" yang dapat hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama, misalnya hidup berdampingan antar metode produksi modern dan tradisional pada sektor perkotaan dan pedesaan, antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan sama sekali, antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis.
2. Kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara, yang karena waktu, perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup

berdampungan antara kemakmuran dan kemiskian secara internasional bukanlah fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata.

3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di NSB tampak semakin jauh dari tahun ketahun.
4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan.

Konsep regional, dualisme regional ini banyak dibicarakan para ahli sejak tahun 1960-an. Pengertian dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Ketidakseimbangan ini sebenarnya terdapat juga di negara-negara maju, tetapi keadaannya tidaklah separah seperti yang terjadi di NSB. Selain itu, di negara-negara maju ketidakseimbangan itu cenderung bertambah kecil.

Di Negara Sedang Berkembang keadaannya berbeda. Di NSB, pada tahap awal proses pembangunannya, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada masa lalu.

Ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga banyak diantaranya mencapai keadaan ekonomi dan sosial yang sudah mendekati mendekati maju, sedangkan di lain daerah perkembangannya sangat lambat dan bahkan mungkin mengalami kemunduran.

Dualisme regional ini dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan (*gap*) tingkat kesejahteraan antara daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di NSB (Arsyad, 1992).

Dualisme regional di NSB dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan
2. Dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut.

Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antar daerah perkotaan dan daerah pertanian (pedesaan). Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menyebabkan kesenjangan/ketimpangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya dan antara daerah perkotaan dengan pedesaan bertambah besar.

4.3. Pembangunan, Distribusi, dan Ketimpangan Pendapatan

Kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan pemerintah yang digariskan dalam RAPBD maupun RAPBN.

Langkah tersebut dilandasi pemikiran bahwa dalam suatu system. Peranan dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan melalui pelimpahan tanggungjawab pemerintah. Pembangunan bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan ekonomi biasanya diikuti bertambahnya ketimpangan/kesenjangan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan kegiatan pembangunan yang terpusat pada daerah-daerah yang pendapatan lebih. Dimana kelebihan tersebut yang memiliki potensi yang merangsang berkembangnya perekonomian, akibatnya terjadi perbedaan pendapatan per kapita dan taraf hidup yang mencolok.

Menurut ekonomi klasik memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan mencapai tingkat keseimbangan alami jika modal dapat mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir ke daerah yang upah tinggi ke daerah yang berupah rendah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan.

Singer mengkritik pandangan tersebut di atas atau pandangan yang menekankan pada terciptanya pembangunan yang berbarengan pada berbagai industri. Kritik utama singer adalah mengenai corak program pembangunan yang harus dilaksanakan di berbagai sektor. Dan menurut Hirschman strategi

pembangunan seimbang merupakan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa secara gradual (perlahan) kegiatan industri modern telah berkembang pada masa lalu (Todaro, 2002)

Hircman mengemukakan pendapat mengenai corak pembangunan yang tidak seimbang. Pada awal perkembangan ekonominakan terpusat, sehingga akan membuat jurang atau perbedaan. Pembangunan yang tidak seimbang ini akan menciptakan gangguan oleh ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian pembangunan yang tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang (Todaro, 2002).

Menurut Mirdal ada dua faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Suatu perbedaan antara antara yang sejahtera dan tidak sejahtera. Hal ini sebagai akibat mekanisme pasar yang tidak mampu mengatasi perbedaan tingkat pembangunan yang makin melebar, maka diperlukan campur tangan pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan pembangunan dan mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan (Kuncoro, 1997).

Peningkatan PNB riil yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Dan meningkatnya pendapatan riil atau pendapatan per kapita atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu, merupakan salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun

meningkatnya pendapatan per kapita itu, yaitu pendapatan rata-rata per penduduk, belumlah mencerminkan terdistribusinya secara merata pendapatan daerah masyarakat yang bersangkutan.

Kelompok kecil masyarakat yang boleh keuntungan besar dari hasil pembangunan itu. Namun kelompok masa lainnya tidak hampir tidak merasakan peningkatan kesejahteraannya, sehingga mereka tetap saja hidup dalam kemelaratan. Jika haal tersebut yang terjadi dikatakan pendapatan nasional atau kenaikan pendapatan nasional yang terjadi tidak terdistribusi dengan merata antar kelompok pendapatan dalam masyarakat. Dikatakan terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat, sehingga perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok kaya dengan kelompok miskin dalam proses pembangunan bisa tidak membaik bahkan bisa menjadi memburuk (Todaro, 2002).

4.4. Distribusi, Ketimpangan Pendapatan Menurut Besarnya

Salah satu cara mengukur distribusi pendapatan adalah seluruh penduduk yang mewakili dalam perekonomian adalah rasio bagian pendapatan kelompok penduduk dan pendekatan distribusi pendapatan secara Fungsional.

4.2.1. Ratio Bagian Pendapatan Kelompok Penduduk

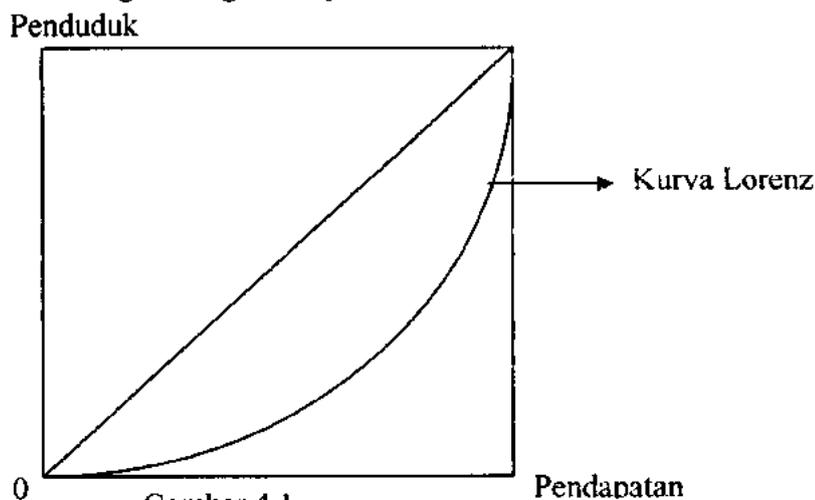
Cara mengukur distribusi pendapatan menurut perseorangan (rumah tangga) adalah pertama-tama semua rumah tangga sebagai sampel-

sampel yang mewakili seluruh penduduk dalam perekonomian negara disusun berurutan dari hasil terkecil hingga terbesar.

Ukuran ketimpangan pendapatannya adalah rasio hasil bagi antara pembagian pendapatan kelompok terbawah 40% (paling miskin) dengan pendapatan kelompok teratas 20% (paling kaya) dalam negara yang bersangkutan. Angka ratio ini terletak antara 0 dan 1, makin kecil angka ini mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin besar, dan semakin besar angka ratio ini ke arah 1 ketimpangan pendapatan semakin kecil (Todaro, 2002).

4.2.2. Kurva Lorenz

Mengukur ketimpangan diantara kelompok perorangan (penduduk) dengan menggunakan Kurva Lorenz, yang merupakan diagram (kurva) yang menunjukkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dengan pangsa (dalam %) jumlah pendapatan yang diterima masing-masing kelompok.



Gambar 4.1
Kurva Lorenz

Dikemukakan bahwa makin timpang distribusi pendapatan, maka Kurva Lorenz akan semakin melengkung, yaitu semakin menjauh diagonal. Ketimpangan sempurna adalah jika Kurva Lorenz berimpit mendekati garis ordinat.

4.2.3. Distribusi Pendapatan Menurut Fungsional

pendekatan distribusi pendapatan secara fungsional dalam proses produksi menerangkan tentang perimbangan bagian pendapatan dari pendapatan nasional yang diterima masing-masing faktor produksi, dan melihat ketimpangan, antar penerima pendapatan menurut kelompok faktor produksi masing-masing secara keseluruhan.

Penyederhanaan persentase jumlah penghasilan tenaga kerja keseluruhan berupa total upah pada satu pihak, dibandingkan dengan bagian pendapatan nasional yang diterima oleh usahawan sebagai keuntungan dimana tercakup juga modal (bunga) dan untuk tanah (sewa). Dalam pendekatan fungsional bahwa ketimpangan semakin besar jika bagian upah relatif (dalam %) semakin kecil, dan ketimpangan semakin kecil jika bagian total upah relatif semakin besar dibanding dengan keuntungan yang diperoleh (Todaro, 2002).

4.5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Prof. Kuznets bahwa tahap pertumbuhan awal proses pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk kemudian pada

tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Hasil observasinya yang dikenal sebagai konsep “U” terbalik dari Kuznets, ini sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan distribusi pendapatan di negara-negara yang dikaji, yang diukur dengan koefisien Gini (Todaro, 2002).

4.6. Trend Dalam Distribusi Pendapatan

4.6.1. Kesenjangan Kota dan Desa

Berbagai studi menunjukkan modernisasi pertanian telah memperlebar kesenjangan/ketimpangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons, *et.al.* (1990) menyimpulkan bahwa Revolusi Hijau telah memperparah kepincangan distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara umum membaik kondisinya sebagai modernisasi pertanian, namun posisi mereka secara relatif lebih buruk dibandingkan petani kaya yang jauh meningkat penghasilannya.

4.6.2. Kesenjangan Regional

Isu kesenjangan ekonomi antardaerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Hendra Esmara (1975) merupakan penelitian pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, yang menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan.

Konstelasi perkembangan terakhir di Indonesia, kesenjangan ekonomi setidaknya dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu (Kuncoro, 1992) :

1. Kesenjanga dari tingkat kemodernan, yaitu kesenjanganantar sektor modern dan dan sektor industri. Sektor umumnya berada di perkotaan dan sektor industri, sedangkan sektor tradisional umumnya berada di pedesaan dan sektor tradisional.
2. Kesenjangan regional adalah kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin (Kawasan Barat Indonesia).
3. Kesenjangan menurut etnis, yaitu antara pribumi dan nonpribumi.

4.7. Peranan Analisis Ekonomi terhadap Redistribusi Hasil Pertumbuhan

Analisis ekonomi pembangunan konvensional berpendapat bahwa distribusi pendapatan yang timpang pada dasarnya diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dan ditambah pula semula mereka tidak merisaukan dan kurang memperhatikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam proses pembangunannya masing-masing (Todaro, 2002).

Dasar argumen ekonomi yang membenarkan ketimpangan pendapatan adalah bahwa pendapatan perseorangan, perusahaan, dan daerah tertentu yang tinggi (akibat ketimpangan distribusi pendapatan) merupakan kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan (dengan Tabungan). Ini memungkinkan terjadinya akumulasi modal dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme

pertumbuhan dua sektor dengan asumsi pasar persaingan sempurna (Todaro, 2002).

Ahli ekonomi pembangunan dewasa ini mengemukakan argumentasi tersebut di atas kurang tepat dan berpendapat bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata merupakan kondisi dan prasyarat yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi dengan 4 alasan utama (Todaro, 2002) :

1. Orang-orang yang kaya di NSB tidaklah hidup hemat dan tidak besar hasrat menabung guna tujuan investasi. Mereka cenderung membelanjakan pendapatannya pada barang impor mewah, rumah mewah, serta mengamankan hartanya melalui *capital flight*.
2. Tingkat hidup yang rendah bagi kelompok massa miskin memperbaiki kesehatan dan rendahnya pendidikan, yang berakibat pada rendahnya produktivitas dalam masyarakat.
3. Peningkatan pendapatan penduduk miskin pada umumnya tertuju pada produksi lokal yang akan dapat mendorong perkembangan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja.
4. Pemerataan distribusi pendapatan yang membaik dan terjadinya "*trickle down effect*" (efek menetes ke bawah) bagi penduduk miskin akan mendorong dedikasi dan partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pembangunan.

4.8. Pilihan Kebijakan Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Kebijakan-kebijakan utama yang umum diambil dalam mengurangi atau mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah sebagai berikut (Todaro, 2002) :

1. Mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengubah harga relatif faktor. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan.
2. Memperbaiki distribusi pendapatan melalui *land reform* (Pembagian tanah pemerintah kepada masyarakat miskin), dan pemberian lunak bagi usaha kecil.
3. Mengurangi pembagian pendapatan golongan atas (kaya) melalui pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang progresif. Dengan demikian peningkatan penerimaan hasil pajak itu akan dapat ditujukan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan bagian pendapatan penduduk golongan bawah (daerah kaya) melalui pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang dan jasa publik atas tanggungan pemerintah. Hal ini antara lain dilakukan melalui pembebasan/keringanan pajak bagi kelompok tertinggal, subsidi pangan, bantuan pelayanan kesehatan, dan bantuan pelayanan lainnya.

4.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000 tahun anggaran akan dimulai tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember (Mardiasmo, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Bab XIII Pasal 224 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah (pusat) di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tabrani, 2004).

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja di pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga perlu memahami darimana sumber keuangan itu diperoleh. Dalam hal ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari (Tabrani, 2004) :

Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan :

- a. Pembentukan, penyempurnaan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
- b. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi :
 1. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasar besaran DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.10. Tujuan Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Asas Negara Kesatuan Indonesia menyatakan bahwa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Atas asas ini

maka antara keuangan negara/pusat dan keuangan daerah terdapat hubungan yang sangat erat sekali, bukan saja antara tingkatan pemerintahan, akan tetapi mencakup pula faktor-faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah (Davey, 1988).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah kompleks, karena mencakup permasalahan yang sangat luas. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merumuskan suatu sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat maupun daerah, baik faktor ekonomi dan ekonomis khususnya politis (Davey, 1988).

Pemerataan keuangan dalam pembiayaan pembangunan tidak dapat ditafsirkan bahwa tiap tingkatan pemerintah di daerah harus dapat membiayai seluruh keperluan dari penerimaan asli daerah. Adanya pemerataan dalam kebijakan trilogi pembangunan memungkinkan diberikannya bantuan atau sumbangan pemerintah pusat kepada daerah, di samping adanya proyek tersebut dilaksanakan (Sadono Sukimo, 1999).

Tujuan hubungan antara keuangan pusat dan daerah (Davey, 1998 : 225), adalah :

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintah mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya.
2. Pemerintah daerah mendapat yang cukup dari sumber-sumber dana, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik (penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan rutin pembangunan).

3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
4. Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.

4.1.1 Analisis Koefisien Variasi

Analisis koefisien variasi merupakan alat analisis untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor disuatu daerah atau wilayah. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang mempengaruhinya dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitanya dengan perekonomian wilayah. Untuk menganalisis dalam tulisan ini digunakan metode statistik yaitu ukuran statistik koefisien variasi. Koefisien variasi dalam hal ini akan digunakan untuk melihat sektor-sektor pembangunan, karena koefisien variasi merupakan suatu ukuran statistik yang dapat membandingkan tingkat variasi dari dua atau beberapa distribusi yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KV = \frac{S_D}{\bar{X}}$$

Dimana S_D = standard deviasi sample

\bar{X} = rata-rata hitung sample

Sehingga dengan menghitung nilai (KV) dan masing-masing variabel akan dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang sudah merata dan sektor-sektor mana yang belum, dimana makin besar nilai KV mempunyai arti makin besar pula variasi sektor tersebut (makin tidak merata) dan demikian sebaliknya.

4.1.2 Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu fenomena dan menganalisis fenomena tersebut sehingga dapat dibuat suatu pola. Analisis faktor dilandasi oleh interpolasi geometrik dan analisis banyak peubah (multi variable) dalam interpolasi statistik.

Dalam menganalisis sejumlah peubah akan dianalisis interkorelasi antar peubah untuk menetapkan apakah variasi-variasi yang tampak dalam peubah berasal atau berdasarkan sejumlah faktor dasar yang jumlah faktornya lebih sedikit dari variasi yang ada pada peubahnya. Dengan kata lain, analisis faktor mempunyai karakter khusus yaitu kemampuan untuk mengurai data. Jika terdapat korelasi dari satu set peubah, maka analisis factor akan memperlihatkan beberapa pola yang mendasari sehingga data yang dapat dirancang atau diulang menjadi set faktor atau komponen yang lebih kecil. Pada dasarnya analisis faktor adalah perluasan dari komponen utama yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data.
2. Antar faktor saling bebas

3. Setiap faktor dapat diinterpretasikan dengan sejelas-jelasnya.

Faktor-faktor yang diperoleh melalui metode komponen utama pada umumnya masih sulit diinterpretasikan secara langsung. Untuk itu, dalam analisis faktor dilakukan suatu teknik yaitu dengan cara merotasi matrix loading L , dalam hal ini menggunakan metode rotasi tegak lurus Varimax, yang menghasilkan matrix loading baru L^* . Dengan merotasi matrix loading, maka setiap peubah asal akan mempunyai korelasi yang tinggi dengan faktor tertentu saja dan dengan tidak factor lain sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan indikator pembangunan. Dari analisis faktor juga diperoleh skor faktor yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan suatu wilayah

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dapat berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun Anggaran 2003, penelitian ini didukung data berupa :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap Kabupaten/Kota di DIY
3. Anggaran dan Penerimaan Belanja (APBD) propinsi D.I Yogyakarta tahun 2003.

5.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini digunakan data sekunder dalam bentuk laporan dari APBD D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2002 - 2003.

5.2.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang berupa uraian secara sistematis. Analisis ini untuk memperoleh informasi – informasi mengenai ketimpangan pembangunan di D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2003.

5.2.2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah yang menggunakan data berupa angka-angka perhitungan. Analisis ini dapat diperoleh dengan menggunakan Metode Koefisien Variasi dan Analisis Faktor.

5.3. Definisi Operasional

1. Lapangan Usaha/kerja (*employment*).

Definisi operasional dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel lapangan usaha/kerja (*employment*). Pengertian mengenai lapangan kerja (*employment*) atau nilai tambah untuk masing-masing daerah seringkali berbeda-beda. Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan menggunakan konsep dasar angkatan kerja (*standard labour force concept*) yang telah direkomendasikan oleh badan kependudukan PBB. Dalam pendekatan ini penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Karena jenis dari kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas tersebut berbeda-beda, maka secara umum dibagi menjadi 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintahan daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang dibagikan daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

4. Pinjaman Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya dinyatakan dalam Bab XIII pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) (Tabrani, 2004).

Adanya pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dan mendewasakan sistem perencanaan anggaran daerah secara

lebih mantap dan mandiri (strategi investasi). Pemerintah daerah menentukan skala prioritas program yang layak dibiayai oleh dana pinjaman yaitu program pengembangan infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur khusus.

Berdasarkan tujuan penggunaannya pinjaman daerah diklasifikasikan menjadi (Departemen Dalam Negeri, dikutip dari Adisubrata, 1999 :8) :

- a. Pinjaman daerah untuk membiayai program infrastruktur sosial yang bertujuan meningkatkan pelayanan umum.
- b. Pinjaman daerah untuk membiayai program infrastruktur ekonomi atas dasar pemulihan biaya.
- c. Pinjaman untuk penyertaan modal dalam perusahaan daerah dan
- d. Pinjaman daerah secara langsung digunakan untuk mengembangkan bidang usaha untuk dapat menghasilkan keuntungan.

Pemerintah daerah senantiasa ingin mendapatkan pinjaman daerah dengan syarat-syarat yang lunak dan tidak memberatkan di saat jatuh tempo membayar angsuran pinjaman (Davey, 1988:227).

Pinjaman daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Menurut Jones (1996) dikutip dari Jhingan (1999) beberapa efek utama yang muncul dan adanya pinjaman pemerintah adalah:

- a. Pemerintah punya kelebihan dana untuk pengeluaran berjalan atau investasi modal.
- b. Kekurangan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta (*private sector*).

3. Bertambahnya pinjaman membutuhkan akan pajak yang lebih tinggi.
4. Keadaan neraca pembayaran akan tertekan (*distorted*) jika pinjaman bersumber dari luar negeri.

5.4 Analisis Koefisien Variasi

Analisis koefisien variasi merupakan alat analisis untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor disuatu daerah atau wilayah. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai factor yang mempengaruhinya dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitanya dengan perekonomian wilayah. Untuk menganalisis dalam tulisan ini digunakan metode statistic yaitu ukuran statistik koefisien variasi. Koefisien variasi dalam hal ini akan digunakan untuk melihat sektor-sektor pembangunan, karena koefisien variasi merupakan suatu ukuran statistik yang dapat membandingkan tingkat variasi dari dua atau beberapa distribusi yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KV = \frac{S_D}{\bar{X}}$$

Dimana S_D = standard deviasi sample

\bar{X} = rata-rata hitung sample

Sehingga dengan menghitung nilai (Kv) dan masing-masing variable akan dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang sudah merata dan

3. Bertambahnya pinjaman membutuhkan akan pajak yang lebih tinggi.
4. Keadaan neraca pembayaran akan tertekan (*distorted*) jika pinjaman bersumber dari luar negeri.

5.4 Analisis Koefisien Variasi

Analisis koefisien variasi merupakan alat analisis untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor disuatu daerah atau wilayah. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai factor yang mempengaruhinya dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitanya dengan perekonomian wilayah. Untuk menganalisis dalam tulisan ini digunakan metode statistic yaitu ukuran statistik koefisien variasi. Koefisien variasi dalam hal ini akan digunakan untuk melihat sektor-sektor pembangunan, karena koefisien variasi merupakan suatu ukuran statistik yang dapat membandingkan tingkat variasi dari dua atau beberapa distribusi yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KV = \frac{S_D}{\bar{X}}$$

Dimana S_D = standard deviasi sample

\bar{X} = rata-rata hitung sample

Sehingga dengan menghitung nilai (Kv) dan masing-masing variable akan dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang sudah merata dan

arti makin besar pula variasi sektor tersebut (makin tidak merata) dan demikian sebaliknya.

5.5 Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu fenomena dan menganalisis fenomena tersebut sehingga dapat dibuat suatu pola. Analisis faktor dilandasi oleh interpolasi geometrik dan analisis banyak peubah (multi variable) dalam interpolasi statistik.

Dalam menganalisis sejumlah peubah akan dianalisis interkorelasi antar peubah untuk menetapkan apakah variasi-variasi yang tampak dalam peubah berasal atau berdasarkan sejumlah faktor dasar yang jumlah faktornya lebih sedikit dari variasi yang ada pada peubahnya. Dengan kata lain, analisis faktor mempunyai karakter khusus yaitu kemampuan untuk mengurai data. Jika terdapat korelasi dari satu set peubah, maka analisis factor akan memperlihatkan beberapa pola yang mendasari sehingga data yang dapat dirancang atau diulang menjadi set faktor atau komponen yang lebih kecil. Pada dasarnya analisis faktor adalah perluasan dari komponen utama yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data.
2. Antar faktor saling bebas
3. Setiap faktor dapat diinterpretasikan dengan sejas-jelasnya.

Faktor-faktor yang diperoleh melalui metode komponen utama pada umumnya masih sulit diinterpretasikan secara langsung. Untuk itu, dalam analisis faktor dilakukan suatu teknik yaitu dengan cara merotasi matrix loading L , dalam hal ini menggunakan metode rotasi tegak lurus Varimax, yang menghasilkan matrix loading baru L^* , yaitu loading yang terdapat pada input data, yang dianalisis untuk menjelaskan ketimpangan dari masing-masing daerah. Dengan merotasi matrix loading, maka setiap peubah asal akan mempunyai korelasi yang tinggi dengan faktor tertentu saja dan dengan tidak factor lain sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan indikator pembangunan. Dari analisis faktor juga diperoleh skor faktor yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan suatu wilayah

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Pendahuluan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi D.I. Yogyakarta dan sumber lain yang terkait, dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kodya Ygyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul serta sektor-sektor ekonomi secara regional yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Dalam penelitian ini digunakan analisis koefisien variasi (KV).

6.2. Koefisien Variasi

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien variasi dari masing-masing variabel pembangunan di Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2002-2003 terlihat masih menunjukkan ketimpangan di beberapa sektor, yaitu,

a. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Dalam bidang Pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, menunjukkan ketimpangan yang berarti. Tingginya variasi dari sektor pertanian masing-masing wilayah yaitu sebesar 57,59%, menunjukkan pengalokasian lapangan kerja dan lahan untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dari masing-masing wilayah belum merata, dimana untuk lahan pertanian daerah kodya Yogyakarta sangat sedikit, sehingga penyerapan tenaga kerja untuk bidang ini juga sangat sedikit. Lahan pertanian lebih banyak berada pada daerah kabupaten Sleman, dimana dapat dilihat dari hasil faktor analisis, pada komponen pertama sektor pertanian yang terbesar berada pada kabupaten Sleman dan yang paling kecil berada pada Kabupaten Gunung Kidul, hal ini dimungkinkan karena Gunung Kidul daerah yang sulit air sehingga untuk pertanian agak susah, ditambah lagi masyarakatnya banyak yang pindah kekota.

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Dalam bidang pertambangan dan penggalian juga menunjukkan ketimpangan yang berarti dari masing-masing daerah. Tingginya variasi dari sektor pertambangan dan penggalian masing-masing wilayah yaitu sebesar 25,77%, menunjukkan pengalokasian pada sektor pertambangan dan penggalian dari masing-masing wilayah masih belum merata, dimana kegiatan pertambangan lebih banyak dilakukan di daerah Kabupaten Gunung Kidul, hal ini dapat dilihat dari hasil faktor analisis, pada

komponen kedua menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian yang paling banyak dilakukan di daerah Gunung Kidul.

c. Industri Pengolahan

Dalam bidang industri pengolahan juga menunjukkan ketimpangan yang berarti dari masing-masing daerah. Tingginya variasi dari sektor industri pengolahan masing-masing wilayah yaitu sebesar 14,21%, menunjukkan pengalokasian pada sektor industri pengolahan dari masing-masing wilayah masih belum merata, dimana kegiatan industri lebih banyak dilakukan di daerah kabupaten Bantul, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis faktor, pada komponen ketiga menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian yang paling banyak dilakukan di daerah kabupaten Bantul.

d. Listrik, Gas, dan Air bersih

Pada bidang listrik, gas dan air bersih, dari hasil koefisien variasi dapat diketahui bahwa sudah terjadi pemerataan, variasi yang terjadi sangat kecil yaitu sebesar 2,39%, hal ini memperlihatkan bahwa pasokan listrik, gas, dan air bersih untuk daerah propinsi D.I. Yogyakarta sudah cukup merata.

e. Bangunan

Pada bidang konstruksi, dari hasil koefisien variasi dapat diketahui bahwa sudah terjadi pemerataan, variasi yang terjadi sangat kecil yaitu sebesar 0,032%, hal ini memperlihatkan bahwa bidang konstruksi untuk daerah propinsi D.I. Yogyakarta sudah merata.

f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pada bidang perdagangan, hotel, dan restoran, dari hasil koefisien variasi dapat diketahui bahwa sudah terjadi pemerataan, variasi yang terjadi hanya yaitu sebesar 0,006%, hal ini memperlihatkan bahwa bidang perdagangan, hotel, dan restoran untuk daerah propinsi D.I. Yogyakarta sudah sangat merata.

g. Pengangkutan dan komunikasi

Pada bidang pengangkutan dan komunikasi, dari hasil koefisien variasi dapat diketahui juga bahwa sudah terjadi pemerataan, variasi yang terjadi hanya yaitu sebesar 0,003%, hal ini memperlihatkan bahwa bidang pengangkutan dan komunikasi untuk daerah-daerah pada propinsi D.I. Yogyakarta sudah sangat merata

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Untuk bidang keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, juga telah terjadi pemerataan untuk masing-masing daerah yang diteliti, dalam hal

ini hampir tidak terjadi variasi sama sekali, hal ini menunjukkan pemerataan dalam bidang ini.

i. Jasa-jasa

Untuk bidang jasa, juga telah terjadi pemerataan untuk masing-masing daerah.

6.3. Analisis Faktor

Analisis factor digunakan karena adanya korelasi yang kuat antar variabel, disamping itu, dapat diketahui keragaman yang terjadi, dimana dapat dijelaskan oleh faktor-faktor loading yang muncul dalam analisis ini. Sehingga melalui analisis faktor ini, diharapkan faktor-faktor yang didapat mampu digunakan sebagai faktor penentu dalam melihat keadaan pembangunan disuatu daerah.

Dalam analisis faktor ini, faktor yang diamati sebanyak 9 faktor. Hasil perhitungan dengan angket SPSS for Windows 11.5, diperoleh 9 faktor, dan dari 9 faktor tersebut, dengan melihat nilai akar ciri dan presentase keragaman setiap faktornya (akar ciri lebih besar atau sama dengan 1), terdapat tiga factor yang memegang peranan penting sebagai penyebab adanya keragaman data tersebut, yaitu;

- a. Komponen utama pertama menghasilkan keragaman total sebesar 57,59% dengan akar ciri sebesar 5,18.

- b. Komponen utama kedua menghasilkan keragaman total sebesar 25,77% dengan akar ciri sebesar 2,32.
- c. Komponen utama ketiga menghasilkan keragaman total sebesar 14,21% dengan akar ciri sebesar 1,28.

Dari ketiga faktor di atas secara bersama-sama mampu menerangkan keragaman total sebesar 97,571% terhadap kontribusi variabel-variabel yang diamati dan dari 9 variabel dapat disederhanakan menjadi 3 faktor yang berpengaruh terhadap penentuan indikator pembangunan guna mengetahui tingkat kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan faktor-faktor yang diperoleh dari hasil ekstraksi awal, ternyata masih belum mampu memberikan arti sebagaimana yang diharapkan, dimana setiap faktor masih sulit diinterpretasi dengan baik. Agar setiap faktor dapat diinterpretasikan dengan baik, perlu dilakukan rotasi dengan menggunakan metode rotasi tegak lurus Varimax dengan bantuan matrik transformasi. Berdasarkan factor hasil rotasi ini setiap faktornya dapat diinterpretasikan, sebagai berikut;

Faktor pertama dibentuk oleh;

- Sektor Industri pengolahan
- Sektor listrik, gas dan air bersih
- Sektor bangunan
- Perdagangan, Hotel, dan restoran
- Pengangkutan dan komunikasi
- Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan

Berdasarkan variabel dominan yang ada pada faktor pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan indikator pembangunan faktor pertama

Faktor kedua dibentuk oleh;

- Sektor Pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan
- Sektor Pertambangan dan penggalian

Berdasarkan variabel dominan yang ada pada faktor kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan indikator pembangunan faktor kedua.

Faktor ketiga dibentuk oleh;

- Jasa-jasa

Berdasarkan variabel dominan yang ada pada faktor ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan indikator pembangunan faktor ketiga.

6.4. Hasil Analisis Faktor

Berdasarkan faktor pertama, kedua, dan ketiga di atas, maka dapat disusun peringkat daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel 6.1, pada table tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menentukan suatu daerah tergolong maju atau tidak, dapat dilihat dari tanda pada skor faktornya. Tanda positif mengidentifikasi bahwa daerah tersebut adalah maju, sedangkan tanda negatif mengidentifikasi daerah tersebut terbelakang.

Tabel 6.1
Tingkat Kemajuan dan Peringkat Masing-masing Daerah tingkat II
berdasarkan Skor Faktor

Faktor Pertama		Faktor Kedua		Faktor Ketiga	
Daerah Tingkat II	Skor Faktor	Daerah Tingkat II	Skor Faktor	Daerah Tingkat II	Skor Faktor
1. Kab Sleman	2,72	1. Kab Gunung Kidul	2,47	1. Kab Bantul	3,62
2. Kodya Yogyakarta	1,42	2. Kab Sleman	1,03	2. Kodya Yogyakarta	-0,02
3. Kab Gunung Kidul	-0,48	3. Kab Bantul	0,67	3. Kab Sleman	-0,56
4. Kab Bantul	-0,93	4. Kab Kulonprogo	-1,18	4. Kab Gunung Kidul	-1,50
5. Kab Kulonprogo	-273	5. Kodya Yogyakarta	-2,99	5. Kab Kulonprogo	-1,54

Tabel di atas menunjukkan, untuk faktor pertama terdapat dua daerah Tingkat II yang sudah tergolong maju jika dilihat dari indikator-indikator pembangunan faktor pertama, yaitu Kabupaten Sleman dan Kodya Yogyakarta. Dari indikator-indikator pembangunan faktor kedua terdapat tiga daerah Tingkat II yang telah maju, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Sedangkan jika dilihat dari indikator-indikator pembangunan faktor ketiga, hanya terdapat satu daerah yang dapat digolongkan daerah maju yaitu Kabupaten Bantul.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

a. Hasil Analisis Koefisien Variasi

Pada tahun 2003 pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta telah berhasil mencapai kemajuan yang cukup memuaskan di hampir semua sektor pembangunan, walaupun di beberapa sektor masih terlihat ketimpangan yang cukup berarti, tetapi sektor-sektor yang menunjang pariwisata, seperti sarana angkutan, telekomunikasi, hotel, restoran dan lain-lain sudah merata. Ketimpangan yang cukup berarti terdapat pada sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, penambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terjadi variasi, variasi terbesar terjadi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, sebesar 57,59%, penambangan dan penggalian sebesar 25,77, industri pengolahan sebesar 14,21, dan listrik, gas, dan air bersih sebesar 2,39%, sedangkan sektor lain sudah merata, karena variasi yang terjadi berada di bawah satu persen

b. Hasil Analisis Faktor

Dari hasil analisis faktor, terlihat bahwa masing-masing daerah memiliki peringkat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai tingkat kemajuan yang berbeda di masing-masing

sektor pembangunan, atau dengan kata lain ada ketimpangan sektoral di masing-masing wilayah.

7.2. Implikasi

Hasil yang diperoleh dari kesimpulan dilihat bahwa perlu diupayakan peningkatan pengelolaan sektor-sektor pertumbuhan secara intensif maupun ekstensif, yaitu;

1. Terus berupaya menggali sektor-sektor potensial dengan perencanaan dan penjabaran daerah dalam menggali sektor pembangunan.
2. Kemampuan perencanaan wilayah untuk menganalisis potensi ekonomi, hal ini terkait dengan kewajiban untuk menentukan sector riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian dapat tumbuh tanpa adanya kendala atau hambatan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sector rendah untuk menanggulangi kelemahan.
4. melihat faktor-faktor yang memiliki keunggulan/kelemahan yang menjadi penting untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor lain untuk berkembang.